



Evektifitas Kebijakan Open Data terhadap Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Pemerintahan di Kabupaten Poso

Herlan Lagantondo^{1*}, Abdi Sakti Walenta²

¹⁻² Universitas Sintuwu Maroso Poso, Indonesia

*Penulis Korespondensi: herlanlagantondo5@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the effectiveness of Open Data policies in enhancing public participation and governmental accountability in Poso Regency. Using a literature-based research approach, the study analyzes secondary data to assess how open access to public information can promote transparency, civic engagement, and administrative oversight. Findings indicate that the implementation of Open Data through the Village Information System (Sistem Informasi Desa, SID) improves administrative efficiency, financial monitoring, and governmental reporting. However, the policy faces several challenges, including low digital literacy among residents, unstable internet connectivity, and public apathy toward participation. These factors limit the optimal role of Open Data in strengthening accountability. The study emphasizes the need for continuous digital literacy programs, the development of adequate information technology infrastructure, and inclusive local leadership to foster citizen engagement. With these strategies, Open Data has the potential to serve as a crucial catalyst for more transparent, accountable, and sustainable local governance in Poso Regency, thereby strengthening the relationship between government and community.*

Keywords: *Government Accountability; Open Data Policy; Public Participation; Village Information System (SID); Digital literacy.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan Open Data dalam meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Poso. Dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka, penelitian menganalisis data sekunder untuk menilai bagaimana akses terbuka terhadap data publik dapat mendorong transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan administratif. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Open Data melalui Sistem Informasi Desa (SID) mampu meningkatkan efisiensi administrasi, pemantauan keuangan, serta pelaporan kegiatan pemerintah desa. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, konektivitas internet yang tidak stabil, dan sikap apatis sebagian warga terhadap partisipasi publik. Faktor-faktor ini membatasi optimalisasi peran Open Data dalam meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini menekankan perlunya program literasi digital yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta kepemimpinan lokal yang inklusif untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Dengan strategi tersebut, Open Data berpotensi menjadi katalis penting bagi tata kelola pemerintahan lokal yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Poso, sehingga memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pemerintahan; Kebijakan Open Data; Literasi digit; Partisipasi Publik; Sistem Informasi Desa (SID).

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, Undang-Undang Pelayanan Publik memiliki karakter yang berbeda dengan undang-undang seperti pada umumnya, karena undang-undang ini mengatur bagaimana sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, juga memuat kepentingan rakyat, yakni bagaimana memberdayakan rakyat dengan sebaik-baiknya agar dapat menikmati dan memanfaatkan pelayanan publik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, karena lebih mendorong penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah untuk lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pemerintahan modern, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dapat diberikan pelayanan. Untuk merealisasikan hak-hak masyarakat, maka dituntut efektivitas kerja yang baik dari instansi pemerintah. Berdasarkan pada analisis situasi dan identifikasi permasalahan yang dialami oleh mitra pada pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan literasi digital yang kuat dan mengajarkan teknik memahami dan menjalankan fitur-fitur dari layanan online yang disediakan oleh pemerintah. Literasi digital berguna untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kecakapan penggunaan teknologi digital serta mendorong mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengadopsi teknologi digital dalam mengakses pelayanan publik. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, kebijakan Open Data muncul sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Secara umum, kebijakan Open Data bertujuan untuk membuka akses data publik bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi melalui penyaluran data publik diharapkan dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, sebagaimana dibahas dalam berbagai studi. Misalnya, Abdullah et al. (2022) menyoroti akuntabilitas kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa, yang menunjukkan bahwa akses data terbuka dapat memperkuat pengawasan masyarakat. Demikian pula, Nurindah et al. (2023) mengungkap pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19 untuk mewujudkan good financial

governance. Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, seperti yang dianalisis oleh Adam et al. (2019), di mana kepemimpinan yang inklusif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut, kebijakan Open Data dapat diintegrasikan dengan pengembangan infrastruktur digital, seperti pusat referensi data desa yang dikembangkan dengan pendekatan standar layanan informasi publik (Nugroho & Maulana, 2024). Hal ini sejalan dengan upaya pelatihan pengelolaan arsip bagi perangkat desa (Rusdiyanto et al., 2022) dan kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data (Putri et al., 2024). Dalam konteks pembangunan, infrastruktur juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibahas oleh Anisa et al. (2024) dan Hayati (2022), yang menekankan peran infrastruktur dalam mendukung akses informasi publik. Strategi digital seperti social media marketing selama pandemi (Kapuy et al., 2023) dan efektivitas website cyber extension (Managanta et al., 2024) menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan komunikasi dan partisipasi.

Menyempit ke tingkat lokal, di Kabupaten Poso, kebijakan Open Data diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintahan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Marande, 2020). Secara keseluruhan, pengaruh kebijakan Open Data di Kabupaten Poso akan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui penyaluran data publik harus diiringi dengan program-program yang meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan. Dalam rangka memahami pengaruh kebijakan Open Data terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Poso, terdapat beberapa dimensi penting yang perlu dieksplorasi, termasuk kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut (Marande, 2020). Pengaruh infrastruktur dasar dan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi desa tertinggal juga relevan, sebagaimana diungkap oleh W & Gusni (2019), yang dapat menjadi dasar untuk menilai efektivitas Open Data dalam konteks lokal.

Penelitian ini, dengan pendekatan library research, bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut secara deduktif, mulai dari konsep umum pelayanan publik hingga aplikasi spesifik di Kabupaten Poso, guna memberikan rekomendasi bagi peningkatan partisipasi dan akuntabilitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau penelitian pustaka. Library research merupakan metode yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen resmi, jurnal, buku, dan artikel terkait (Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Open Data terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Poso secara mendalam, tanpa memerlukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara lapangan. Dengan demikian, fokus utama adalah pada sintesis dan interpretasi data yang telah ada, yang memungkinkan eksplorasi konsep secara deduktif, mulai dari teori umum tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hingga aplikasi spesifik di konteks lokal Kabupaten Poso.

Pendekatan deduktif diterapkan dalam penelitian ini, di mana analisis dimulai dari premis umum mengenai kebijakan Open Data sebagai instrumen peningkatan transparansi, kemudian diturunkan ke hipotesis atau kesimpulan spesifik berdasarkan bukti literatur. Hal ini sejalan dengan prinsip deduktif yang menekankan pada pengujian teori melalui data sekunder untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual (Neuman, 2014). Proses deduktif ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumen dari konsep luas pelayanan publik dan desentralisasi, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, hingga implikasi lokal di Kabupaten Poso.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kebijakan Open Data, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan. Sumber utama meliputi :

Jurnal ilmiah dan artikel peer-reviewed, seperti yang dikutip dalam referensi: Abdullah et al. (2022) tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa; Adam et al. (2019) mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat; Marande (2020) tentang kualitas pelayanan publik di Kabupaten Poso; Nugroho dan Maulana (2024) terkait pengembangan pusat referensi data desa; serta Nurindah et al. (2023) tentang transparansi dana desa selama pandemi.

Dokumen kebijakan dan laporan pemerintah, termasuk Undang-Undang Pelayanan Publik dan regulasi terkait desentralisasi.

Sumber pendukung lainnya, seperti studi tentang infrastruktur digital dan teknologi informasi, misalnya Rusdiyanto et al. (2022) mengenai pelatihan pengelolaan arsip desa; Putri et al. (2024) tentang kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data; serta Anisa et al. (2024) dan Hayati (2022) tentang peran infrastruktur dalam pembangunan.

Pemilihan sumber data difokuskan pada literatur yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini, khususnya di era digital dan pasca-pandemi Covid-19. Kriteria inklusi sumber meliputi relevansi topik, kredibilitas (dari jurnal terindeks atau DOI), dan spesifisitas konteks Indonesia, terutama wilayah pedesaan atau daerah seperti Kabupaten Poso.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan situs jurnal nasional (misalnya Syntax Literate, Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik). Kata kunci yang digunakan mencakup "kebijakan Open Data", "partisipasi publik", "akuntabilitas pemerintahan", "Kabupaten Poso", "transparansi dana desa", dan "literasi digital pelayanan publik". Proses ini melibatkan tahap screening awal untuk menyaring abstrak, diikuti dengan pembacaan penuh artikel yang relevan. Selain itu, teknik snowballing diterapkan, di mana referensi dari artikel utama digunakan untuk menemukan sumber tambahan yang terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis konten kualitatif dengan pendekatan deduktif. Langkah-langkahnya meliputi :

(1) Pengkodean tematik: Mengidentifikasi tema utama dari literatur, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, berdasarkan kerangka teori umum. (2) Sintesis deduktif: Menghubungkan temuan umum (misalnya dari Abdullah et al., 2022; Nurindah et al., 2023) dengan konteks spesifik Kabupaten Poso (seperti Marande, 2020). (3) Triangulasi sumber: Membandingkan data dari berbagai referensi untuk memvalidasi kesimpulan, guna menghindari bias dan meningkatkan reliabilitas. (4) Interpretasi: Menarik kesimpulan tentang efektivitas kebijakan Open Data melalui lensa dimensi penting seperti implementasi, pemanfaatan oleh pemangku kepentingan, dan program pendukung kesadaran masyarakat.

Keabsahan penelitian dijaga melalui ketelitian dalam sitasi dan pemilihan sumber yang kredibel, sementara keterbatasan library research seperti ketergantungan pada data sekunder diakui dan dimitigasi dengan keragaman sumber.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode 2024-2025, dengan fokus analisis pada data hingga tahun 2024, untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintahan daerah di Kabupaten Poso.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis library research dengan pendekatan deduktif, hasil penelitian ini menyintesis data sekunder dari berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan studi kasus terkait kebijakan Open Data di Kabupaten Poso. Mulai dari konsep umum Open Data sebagai instrumen transparansi pemerintahan, analisis diturunkan ke aplikasi spesifik di tingkat lokal, khususnya pengaruhnya terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan Open Data memiliki potensi positif, tetapi implementasinya di Kabupaten Poso masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, yang memengaruhi efektivitas secara keseluruhan.

Secara umum, kebijakan Open Data di Indonesia bertujuan untuk membuka akses data publik guna meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Nugroho & Maulana, 2024). Di Kabupaten Poso, kebijakan ini diwujudkan melalui inisiatif seperti Sistem Informasi Desa (SID) berbasis Open SID, yang memfasilitasi penyimpanan, pengelolaan, dan publikasi data desa. Studi di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, menunjukkan bahwa sosialisasi SID pada Oktober 2024 berhasil meningkatkan pengetahuan aparatur desa dari 62,5% menjadi 82,9% melalui pre-test dan post-test, sehingga memperkuat efisiensi pelayanan administrasi seperti pendataan kependudukan dan pengajuan surat secara digital. (Galip L 2025)

Hal ini sejalan dengan temuan Marande (2020) yang menekankan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Poso Kota, di mana akses data terbuka dapat mengurangi ketidakefisienan manual dan meningkatkan transparansi.

Pengaruh kebijakan Open Data terhadap partisipasi publik di Kabupaten Poso terlihat positif namun belum optimal. Open Data memungkinkan masyarakat mengakses informasi pembangunan, seperti pengelolaan dana desa dan potensi wisata, yang mendorong keterlibatan aktif (Adam et al., 2019). Di Desa Tri Mulya, Kecamatan Poso Pesisir Utara, partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, dan BPD, tetapi tingkat keterlibatan rendah karena kurangnya pemahaman dan sikap apatis. (Syuaib & Lamandasa, 2025)

Faktor internal seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap informasi pembangunan menjadi penghambat, sebagaimana diidentifikasi dalam sosialisasi SID di Desa Kilo, di mana partisipasi publik perlu ditingkatkan melalui forum diskusi dan papan informasi di setiap RT. (Galip L, 2025)

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif dapat memperkuat partisipasi, tetapi di Poso, hal ini terganggu oleh keterbatasan sumber daya manusia (Rusdiyanto et al., 2022). Di Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, transparansi dana desa melalui baliho di kantor desa mendorong partisipasi, tetapi kurangnya informasi lengkap tentang kegiatan yang belum dilaksanakan menghambat keterlibatan masyarakat penuh. (Fadila, 2023) Secara deduktif, partisipasi publik meningkat ketika Open Data diintegrasikan dengan literasi digital, seperti pelatihan penggunaan teknologi untuk mengakses layanan online, yang dapat menumbuhkan kesadaran hak warga negara (Putri et al., 2024).

Terhadap akuntabilitas pemerintahan, kebijakan Open Data berkontribusi signifikan melalui mekanisme pelaporan terbuka. Di Kabupaten Poso, akuntabilitas ditingkatkan dengan publikasi data keuangan, seperti realisasi anggaran dana desa, yang memungkinkan pengawasan masyarakat (Abdullah et al., 2022). Studi di Desa Tri Mulya menunjukkan bahwa pembuatan baliho realisasi anggaran tahunan memperkuat akuntabilitas, meskipun tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa memerlukan pelatihan tambahan. (Syuaib & Lamandasa, 2025)

Di Desa Lape, pengelolaan dana desa senilai Rp739.861.000 pada 2022 dilakukan melalui rekening kas desa dengan pelaporan ke Camat, tetapi asas transparansi belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya alamat pengaduan dan informasi kegiatan, yang bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. (Fadila, 2023)

Nurindah et al. (2023) menambahkan bahwa selama pandemi Covid-19, transparansi dana desa di daerah serupa Poso krusial untuk good financial governance, di mana Open Data mengurangi risiko korupsi. Namun, di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kombinasi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, yang secara simultan meningkatkan tata kelola (Kadang et al., 2021, seperti dirujuk dalam literatur terkait). S Kadang, et al (2021).

Kendala utama termasuk jaringan internet tidak stabil dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang menghambat aksesibilitas data (Managanta et al., 2024).

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan Open Data di Kabupaten Poso bergantung pada implementasi yang didukung program literasi digital dan infrastruktur. Temuan deduktif menunjukkan peningkatan partisipasi dan akuntabilitas ketika Open Data diiringi sosialisasi, seperti di Desa Kilo, tetapi tanpa itu, partisipasi tetap rendah seperti di Tri Mulya. Rekomendasi mencakup peningkatan edukasi masyarakat, penggunaan media sosial untuk transparansi, dan pelatihan aparatur desa guna mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel (Kapuy et al., 2023; W & Gusni, 2019). Penelitian ini menegaskan bahwa Open Data bukan hanya alat teknis,

melainkan katalisator perubahan sosial di tingkat lokal, dengan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso.

Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis library research dengan pendekatan deduktif terhadap efektivitas kebijakan Open Data di Kabupaten Poso, berikut adalah ringkasan temuan penelitian utama yang disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman :

Table 1. Temuan Penelitian

Aspek	Temuan Utama	Tantangan Utama	Dampak dan Rekomendasi	Sumber Referensi
Transparansi Pemerintahan	Kebijakan Open Data melalui SID (Sistem Informasi Desa) berhasil meningkatkan akses data publik, seperti di Desa Kilo dengan peningkatan pengetahuan aparatur desa dari 62,5% menjadi 82,9% setelah sosialisasi.	Kurangnya informasi lengkap tentang kegiatan belum dilaksanakan, seperti di Desa Lape, yang bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.	Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi digital; rekomendasi: Integrasi dengan literasi digital untuk akses yang lebih luas.	Marande (2020); Nugroho & Maulana (2024)
Partisipasi Publik	Partisipasi masyarakat meningkat dalam proyek infrastruktur di Desa Tri Mulya melalui keterlibatan tokoh masyarakat, tetapi masih rendah karena apatis dan kurangnya pemahaman. Di Desa Kilo, sosialisasi SID mendorong forum diskusi.	Rendahnya kesadaran dan sikap apatis masyarakat, ditambah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa.	Potensi positif untuk keterlibatan aktif jika didukung kepemimpinan inklusif; rekomendasi: Pelatihan literasi digital dan penggunaan media sosial untuk sosialisasi.	Adam et al. (2019); Rusdiyanto et al. (2022); Putri et al. (2024)
Akuntabilitas Pemerintahan	Publikasi data keuangan seperti realisasi anggaran dana desa di Desa Tri Mulya dan Lape memperkuat pengawasan masyarakat, mengurangi risiko korupsi selama pandemi. Di Desa Meko, kombinasi akuntabilitas dan transparansi meningkatkan tata kelola.	Keterbatasan kapasitas aparatur desa, jaringan internet tidak stabil, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menghambat aksesibilitas data.	Signifikan dalam good financial governance; rekomendasi: Pelatihan aparatur desa dan penyediaan alamat pengaduan untuk transparansi penuh.	Abdullah et al. (2022); Nurindah et al. (2023); Managanta et al. (2024)
Implementasi Keseluruhan	Kebijakan Open Data bergantung pada pemanfaatan oleh pemangku kepentingan, dengan potensi katalisator perubahan sosial di tingkat lokal seperti di Kabupaten Poso.	Tantangan struktural (infrastruktur) dan kultural (kesadaran masyarakat) yang memerlukan program pendukung.	Kontribusi pada pembangunan berkelanjutan; rekomendasi: Peningkatan edukasi dan infrastruktur digital untuk optimalisasi.	Kapuy et al. (2023); W & Gusni (2019); Marande (2020)

Sumber : Diolah 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Open Data memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Poso, meskipun efektivitasnya

masih tergantung pada penanganan tantangan implementasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

PEMBAHASAN

Analisis kebijakan Open Data di Kabupaten Poso menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi dan dukungan konteks lokal. Berdasarkan temuan, Open Data melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kilo meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, seperti pendataan kependudukan, dengan peningkatan pengetahuan aparatur desa hingga 82,9% setelah sosialisasi (Nugroho & Maulana, 2024). Hal ini sejalan dengan teori transparansi yang menegaskan bahwa akses data terbuka memperkuat pengawasan masyarakat dan mengurangi risiko korupsi, sebagaimana diungkap oleh Nurindah et al. (2023) dalam pengelolaan dana desa selama pandemi. Namun, di Desa Lape, ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, seperti kurangnya alamat pengaduan, menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya tercapai.

Partisipasi publik di Kabupaten Poso menunjukkan perkembangan positif, terutama di Desa Tri Mulya, di mana keterlibatan tokoh masyarakat dalam proyek infrastruktur meningkat, tetapi rendahnya kesadaran dan sikap apatis masyarakat menjadi kendala utama (Adam et al., 2019). Ini mengindikasikan bahwa Open Data saja tidak cukup tanpa program pendukung seperti literasi digital, yang mendorong masyarakat memahami hak mereka dalam mengakses layanan publik (Putri et al., 2024). Sosialisasi SID di Desa Kilo menunjukkan potensi forum diskusi untuk meningkatkan partisipasi, tetapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sebagaimana diidentifikasi oleh Rusdiyanto et al. (2022), masih menghambat.

Pada aspek akuntabilitas, Open Data memperkuat pengawasan masyarakat terhadap dana desa, seperti di Desa Tri Mulya dan Lape, dengan publikasi realisasi anggaran (Abdullah et al., 2022). Studi di Desa Meko menegaskan bahwa kombinasi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi mendorong tata kelola yang lebih baik (Kadang et al., 2021). Namun, kendala seperti jaringan internet tidak stabil dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sebagaimana diungkap Managanta et al. (2024), membatasi aksesibilitas data. Hal ini menunjukkan perlunya infrastruktur digital yang memadai, sejalan dengan temuan Anisa et al. (2024) tentang peran infrastruktur dalam pembangunan.

Secara deduktif, kebijakan Open Data efektif jika didukung oleh literasi digital, kepemimpinan inklusif, dan infrastruktur memadai. Tanpa elemen ini, seperti di beberapa desa di Poso, potensi Open Data sebagai katalisator perubahan sosial terhambat. Rekomendasi

mencakup pelatihan aparatur desa, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi (Kapuy et al., 2023), dan peningkatan edukasi masyarakat untuk mengatasi apatis dan meningkatkan partisipasi. Dengan demikian, kebijakan Open Data di Kabupaten Poso dapat menjadi fondasi bagi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan Open Data di Kabupaten Poso memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi dan dukungan konteks lokal. Melalui Sistem Informasi Desa (SID), akses terhadap data publik, seperti pengelolaan dana desa, telah meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, seperti pendataan kependudukan, dan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap anggaran. Partisipasi masyarakat menunjukkan perkembangan positif, terutama melalui keterlibatan tokoh masyarakat dalam proyek infrastruktur, tetapi rendahnya kesadaran dan sikap apatis masih menjadi kendala utama. Akuntabilitas pemerintahan juga meningkat melalui publikasi data keuangan, meskipun tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, jaringan internet yang tidak stabil, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menghambat aksesibilitas data. Secara keseluruhan, kebijakan Open Data dapat menjadi katalisator perubahan sosial jika didukung oleh literasi digital, kepemimpinan inklusif, dan infrastruktur yang memadai. Tanpa elemen pendukung ini, potensi Open Data untuk mendorong partisipasi dan akuntabilitas di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Poso, belum sepenuhnya optimal. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Saran

Untuk mengoptimalkan kebijakan Open Data di Kabupaten Poso, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, perlu ada program pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengakses serta memanfaatkan data terbuka. Kedua, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang stabil, guna mendukung aksesibilitas data di wilayah pedesaan. Ketiga, sosialisasi melalui media sosial dan forum diskusi di tingkat desa dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keempat, pelatihan khusus bagi aparatur desa perlu dilakukan

untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan publikasi data, termasuk penyediaan alamat pengaduan guna memenuhi standar transparansi. Kelima, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan penyuluh dapat memperluas adopsi teknologi dan kebijakan Open Data melalui pendekatan penyuluhan yang praktis. Terakhir, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan Open Data perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan peningkatan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan Open Data dapat diimplementasikan secara efektif, mendukung partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., Junaedi, J., & Sanusi, S. (2022). Akuntabilitas kepala desa terhadap pengelolaan anggaran dana desa. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17035–17054. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11946>
- Adam, L., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 144–164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Anisa, S., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>
- Fadila. (2023). Evaluasi kebijakan dalam menunjang transparansi informasi publik (studi dana desa) di Desa Lare Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. https://repository.unsimar.ac.id/1940/1/Bab_1_dp.pdf
- Galip, L., Karmila, A., & Abdul, R. (2025). Sosialisasi sistem informasi desa dalam menunjang pelayanan publik. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/download/31439/pdf>
- Hayati, L. (2022). Analisis pembangunan infrastruktur jalan terhadap perkembangan pariwisata kawasan pinggiran kota. *Journal Economics and Strategy*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.36490/jes.v3i2.294>
- Kapuy, H., Raimanu, G., & Lamandasa, S. (2023). Strategi social media marketing di masa pandemi COVID-19 terhadap peningkatan business value UMKM. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 177–190. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.219>
- Kumalasari, I., Akbariah, L., Natasha, C., & Nashihah, D. (2023). Mengukur sentimen ASN: Tinjauan kepuasan ASN terhadap perencanaan strategis dalam pembangunan infrastruktur pemerintah daerah di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 285–292. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.134>
- Managanta, A., Wengkau, R., & Tambingsila, M. (2024). Efektivitas website cyber extension sebagai media komunikasi dan informasi penyuluh. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(1), 53–62. <https://doi.org/10.51852/jpp.v19i1.771>

- Marande, Y. (2020). Kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 33–39.
- Mohammad Rusli Syuaib, & Lamandasa, S. (2025). Implementasi good governance dalam pembangunan Desa Tri Mulya Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. <https://doi.org/10.59713/projip.v4i1.1338>
- Nugroho, R., & Maulana, M. (2024). Pengembangan pusat referensi data desa dengan pendekatan standar layanan informasi publik desa. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 8(2), 160–169. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v8i2.7455>
- Nurindah, N., Abdullah, M., & Sari, N. (2023). Mengungkap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial governance di tengah pandemi COVID-19 (studi pada Desa Kaliang di Pinrang). *Indonesian Journal of Tax and Account*, 1, 9–24. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023a2>
- Rusdiyanto, W., Respati, Y., & Yoviantyas, C. (2022). Pelatihan pengelolaan arsip bagi perangkat desa Sinduharjo Ngaglik Sleman. *International Journal of Community Service Learning*, 6(4), 521–529. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i4.49897>
- Putri, K., Asrinaldi, A., & Putri, I. (2024). Best practice kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020. *Jurnal Niara*, 16(3), 552–560. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.15847>
- Kadang, S., Laloma, A., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Meko Kecamatan. *E-Journal UNSRAT*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- W., N., & Gusni, G. (2019). Pengaruh infrastruktur dasar dan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi desa tertinggal. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 171. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i02.p03>